

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Pustaka

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, penulis mengutip beberapa pendapat para ahli dan teori yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan dan sebagai landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Konsep Pemerintahan

Dalam berbagai telaah pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah banyak memberikan defenisi tentang apa itu Pemerintahan dan apa itu Ilmu Pemerintahan, sebelum membahas lebih jauh, penulis mencoba mengutip beberapa pendapat ahli tentang defenisi dari Pemerintahan dan Ilmu Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Menurut Syafiie (2002:11) pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan suatu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistimatis serta spesifik (khas).

Selanjutnya menurut Iver dalam syafiie (2002:13) pemerintahan itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan, Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Apabila dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan, dibagi atau dipisahkan maka terdapat perbedaan antara pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislatif) dan yang melaksanakan peradilan (disebut yudikatif). (Syafiie, 2002:11)

Menurut Strong pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karen itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara. (dalam Syafiie, 2002:13)

Menurut Wilson pemerintah dalam akhir uraiannya, adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud-maksud bersama mereka, dengan hal-hal memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. (dalam Syafiie, 2002:14)

Menurut Brasz dalam Syafiie (2002:12) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menyeimbangkan pelaksanaan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. (Syafiie, 2002:15)

Menurut Yusri Munaf (2015) menyatakan bahwa pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *government* yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus Negara dan menjalankan kehendak rakyat, kecenderungannya lebih tertuju kepada lembaga

eksekutif (*executive heavy*). Pemerintah atau pemerintahan, adalah dua kata yang berasal dari suku kata “perintah” yang berarkti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefenisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki mandate yang abash dari rakyat utuk menjalankan wewenang-wewangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak social” antara rakyat sebagai pemberi mandat dan pemerintah sebagai pelaksana manfaat.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu bekerja, serta disusun dan difungsikan dalam sisitem pemerintahan umum.

Menurut Ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan itu mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Lebih lanjut Ndara (2003:75) menjelaskan bahwa pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu system ketertiban dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar dan dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara, untuk itu dibutuhkan pemerintahan daerah.

Menurut Atmosudirdjo dalam Syafiie (2007:18) tugas pemerintahan antara lain adalah tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

Secara legalitas formal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (2) menjelaskan: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Teori Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut Dunn (2013: 28), evaluasi membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuai antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan , membantu dan menyesuaikan dan merumuskan kembali masalah.

Menurut Arikunto (2009: 297) evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan.

Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasi. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. (Dalam Arikunto dan Safrudin, 2009: 5)

b. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan memiliki tujuan. Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain.
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian. Menurut Suharsimi

Arikunto dan Cipi Safruddin Abdul Jabar (2009: 7), terdapat perbedaan yang mencolok antara penelitian dan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan penelitian, peneliti ingin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya dideskripsikan, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui seberapa tinggi mutu atau kondisi sesuatu sebagai hasil pelaksanaan program, setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan criteria atau standar tertentu.
- b. Dalam kegiatan penelitian, peneliti dituntut oleh rumusan masalah karena ingin mengetahui jawaban dari penelitiannya, sedangkan dalam evaluasi program pelaksanaan ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksanaan ingin mengetahui letak kekurangan itu dan apa sebabnya.

Dengan adanya uraian diatas, dapat dikatakan bahwa evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada dasarnya penelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengetahui akhir dari adanya kebijakan, dalam rangka menentukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

c. Model Evaluasi Kebijakan

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil

keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

Pemilihan model evaluasi yang akan digunakan tergantung pada tujuan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi program pembelajaran keterampilan memasak digunakan pendekatan system. Pendekatan system adalah pendekatan yang dilaksanakan dalam mencakup seluruh proses pendidikan yang dilaksanakan.

Menurut Dunn (2013: 232), Model kebijakan (*Policy Model*) adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Adapun tipe-tipe model kebijakan tersebut adalah:

1. Model Deskriptif
2. Model Normatif
3. Model Verbal
4. Model Simbolis
5. Model Prosedural
6. Model Sebagai Pengganti dan Perspektif.

Rasyid (2008: 37) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.
3. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.
4. Kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.
5. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakn dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya: efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi

kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*appropriateness*) adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas *substantive*, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Secara singkat kriteria evaluasi menurut Thoha (2006: 16), meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Perataan
5. Responsivitas
6. Ketepatan

Dari kriteria evaluasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa evaluasi yang harus dilakukan bersifat efektif dan efisien. Selain itu, evaluasi harus memiliki kecukupan data serta perataan. Kemudian evaluasi harus diberikan tanggapan secara objektif tanpa ada hal yang ditutup-tutupi. Terakhir evaluasi harus mencapai sasaran yang diharapkan.

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu *sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan.*

Secara spesifik, Handayani (2006: 117) mengembangkan tiga pendekatan evaluasi implementasi kebijakan, yang tujuan, asumsi, dan bentuk-bentuk utamanya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Evaluasi Semu. Tujuannya menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan. Asumsi bahwa ukuran manfaat atau nilai terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial. Bentuk utama adalah eksperimen sosial, simulasi, sistem sosial, pemeriksaan sosial, sintesis riset dan praktik.
2. Pendekatan Evaluasi Formal, Tujuannya adalah menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan. Asumsinya tujuan dan sasaran dari pembuat kebijakan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Bentuk utama adalah evaluasi perkembangan, evaluasi eksperimental, evaluasi proses retrospektif, evaluasi hasil retrospektif.
3. Pendekatan evaluasi keputusan teoritis. Tujuannya adalah menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsinya tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam-diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai. Bentuk utama penilaian tentang dapat tidaknya dievaluasi Analisis utilitas multiatribut.

Sebagai pembanding, Lester dan Steward, Jr. dalam mengelompokkan evaluasi implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang

berkenaan dengan proses implementasi; evaluasi dampak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil dan / atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki dan evaluasi *meta-evaluasi* yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu. (Dalam Fremotz, 2011: 20)

Menurut Suryana (2004: 31) ada pula penilaian evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, yaitu:

1. Evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan (proses dan hasilnya) dengan implementasi kebijakan yang sama atau berlainan, di satu tempat yang sama atau berlainan.
2. Evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan-kebijakan tersebut.
3. Evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi namun menggunakan eksperimen yang diletakkan dalam sejenis laboratorium.
4. Evaluasi *ad hock*, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak dalam waktu segera untuk mendapatkan gambaran pada saat itu (*snap shot*).

Anderson (Dalam Winarno, 2003: 168) membagi evaluasi (implementasi) kebijakan publik menjadi tiga. Tipe pertama, evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional. Kedua, evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah dicapai.

Sementara itu, Bingham dan Felbinger (dalam Dunn, 2003) Membagi evaluasi kebijakan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:

1. Evaluasi proses, yang focus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
2. Evaluasi dampak, yang fokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
3. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
4. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Menurut Nugroho (2006: 74) mengelompokkan evaluasi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif – anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:
 - a. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (*output*) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
 - c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
 - d. *Efficiency evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
 - e. *Process evaluation*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
3. Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.

3. Teori Impelentasi (Pelaksanaan) Program

Konsep implementasi mencakup dua hal pokok yaitu program kebijakan (*policy*) yang kemudian akan menghasilkan *outcomes*. Tujuan-tujuan dari kebijakan dirumuskan oleh berbagai aktor dalam proses politik, sehingga definisi implementasi harus mengemukakan aktor-aktor yang terlibat dalam proses. Aktor-aktor ini meliputi dua kelompok yaitu *lbmator* dan *implementator*.

Menurut Nugroho (20012: 674), Pengalaman paling penting adalah kita harus memberikan perhatian pada impelentasi kebijakan karena administrasi publik kita sering mengalami *implemetation myopia*, yaitu matanyabesar, membelalak, tetapi tidak melihat kesalahan besar didepan hidungnya. Tiga miopia implementasi kebijakan tersebut adalah:

1. Selama ini sebagian besar risorsis kita habiskan untuk membuat perencanaan, namun tidak cukup untuk bagaimana melaksanakannya.
2. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah diputuskan, diundangkan, lantas rakyat dianggap tahun, dan kalau salah langsung dihukum.
3. Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, diimplementasikan “jalan dengan sendirinya”.

Berdasarkan definisi implementasi tersebut, maka terdapat dua konsep dalam implementasi yang memiliki fokus yang berbeda, yaitu:(Dunn, 2013: 162)

1. Implementasi sebagai tujuan akhir atau pencapaian kebijakan (*policy achievement*), Fokus dalam konsep ini adalah evaluasi, yaitu menilai (*implementation judgment*) sampai sejauh mana keberhasilan implementasi (fungsi penyelesaian/ *accomplishment function*).
2. Implementasi sebagai proses atau eksekusi kebijakan yang memberikan fokus pada prosesnya (fungsi sebab akibat/ *causal function*)

Menurut Widodo (2006: 116) dalam melakukan analisis implementasi atau evaluasi kebijakan terdapat dua pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan kepatuhan

Pendekatan ini beranggapan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Evaluasi implementasi kebijakan yang menggunakan pendekatan ini akan banyak melakukan analisis perilaku organisasi.

2. Perspektif "apa yang terjadi" ("*what's happening*").

Pendekatan ini memotret pelaksanaan kebijakan atau program dari segala hal. Pendekatan ini berasumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh segala ragam variabel dan faktor. Dengan demikian, apa yang terlibat dan berlangsung di dalam implementasi jauh lebih penting untuk ditangkap dan dikaji ketimbang selalu mempersoalkan sesuai tidaknya implementasi dengan keharusan-keharusan yang semestinya dilakukan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu harapan dalam proses kebijakan public. Kebijakan Negara menurut David Easton (Dalam Islamy, 2007: 20) : “pengalokasian nilai – nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat “. Berdasarkan definisi diatas Easton menegaskan bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dalam bentuk pengalokasian nilai–nilai pada masyarakat.

Menurut Meter dan Horn (Dalam Solichin, 2004: 65), merumuskan proses implementasi ini sebagai “ tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individu / pejabat – pejabat atau kelompok – kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Selanjutnya Islamy, (2007: 19) menyebutkan 5 implikasi dari pengertian kebijaksanaan Negara ialah :

1. Bahwa kebijakan Negara itu selalu mempunyai tujuan – tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan Negara itu berisi tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan pejabat – pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijaksanaan pemerintah setidak – tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan – peraturan perundang – undangan yang bersifat memaksa.
4. Bahwa kebijakan Negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dari uraian di atas maka dapat diartikan bahwa suatu kebijakan selalu memiliki tujuan kemudian dituangkan dalam program – program pemerintah yang berisi tindakan – tindakan dari pemerintah. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa kebijakan publik diterapkan secara jelas kedalam peraturan perundang–undangan atau peraturan pemerintah.

Sehubungan dengan impelentasi program pemerintah tentang HIV/AIDS, maka dalam penelitian digunakan teori George C. Edward III (1980,1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi public adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu:

1. *Communication* (Komunikasi)
2. *Resource* (Sumber Daya)
3. *Disposition and attitudes* (Diposisi atau sikap)
4. *Bureaucratic strutures* (Struktur Birokrasi)

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.

Resource (Sumber Daya) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan public untuk *carry out* kebijakan secara efektif.

Disposition and attitudes (Diposisi atau sikap) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk *carry out* kebijakan public tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan.

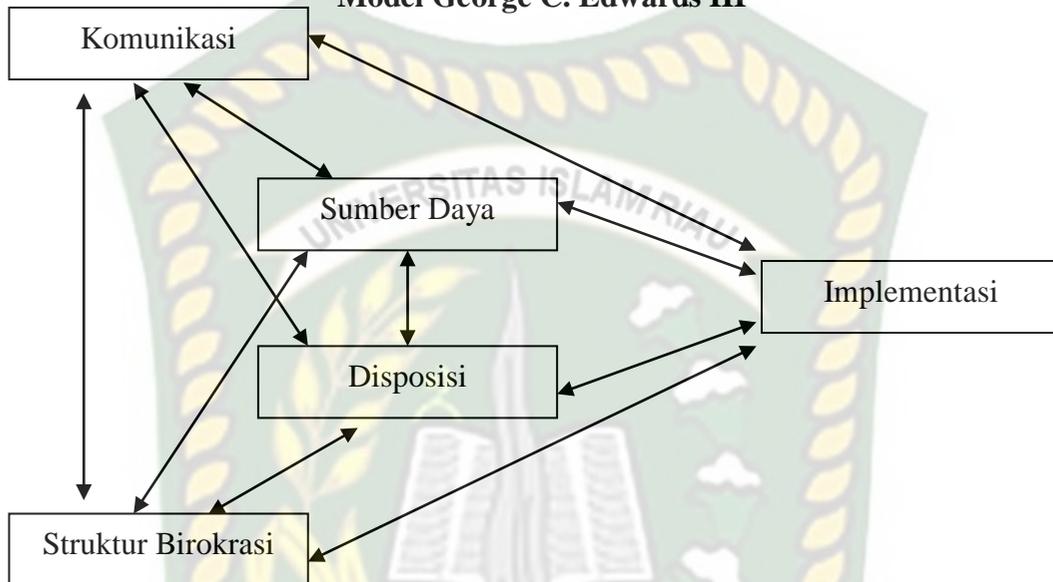
Bureaucratic structures (Struktur Birokrasi) berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

Menurut Edwards (1980) dalam Subarsono (2006: 89), komunikasi harus ditransmisikan kepada personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III menyatakan: “*Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear accurate, and consistent*”. Dalam hal ini Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat keputusan/*decision maker* berharap agar implementasi kebijakan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/*discretion* pada para implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan umum menjadi tindakan yang spesifik. Diskresi ini tidak perlu dilakukan jika terdapat aturan yang jelas serta spesifik mengenai apa yang perlu dilakukan. Namun, aturan yang terlalu kaku juga dapat menghambat implementasi karena akan menyulitkan adaptasi dari para implementor. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang ditransmisikan kepada agen pelaksana yang tepat, jelas, dan konsisten, tetapi tidak menghalangi adaptasi dari para agen pelaksana tersebut.

Selanjutnya George C. Edwards III dalam Subarsono menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah inti sari dan menanyakan apakah pra kondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan yang sukses? Untuk menjawab hal tersebut penting dipertimbangkan empat faktor atau

variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu: komunikasi, sumber, disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

Gambar 2.1.
Model George C. Edwards III



Sumber : AG. Subarsono, 2006 : 91.

Tanpa memandang seberapa pun jelas dan konsistennya perintah implementasi dan tanpa memandang seberapa pun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber daya, maka implementasi tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud oleh Edwards, sebagaimana disebutkan di atas meliputi staff, informasi, otoritas, dan fasilitas.

Selain komunikasi dan sumber daya, Edwards III memandang disposisi dari implementor sebagai faktor yang penting. Edwards III menyatakan: *“If implementors are well-disposed toward a particular policy, they are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended. But when implementors’ attitudes or perspectives differ from the decisionmakers’, the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated”*. Dalam hal ini

Edwards III menekankan bahwa sikap atau yang beliau sebut sebagai disposisi merupakan hal yang krusial karena jika implementor kebijakan memiliki disposisi yang berlawanan dengan arah kebijakan, maka perspektif ini juga dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang sesungguhnya dengan implementasi kebijakan di lapangan. Dicontohkan oleh Edwards III, bahwa banyak negara bagian dan sekolah-sekolah di AS yang tidak mengalokasikan dana bagi anak berkebutuhan khusus meskipun aturan tentang alokasi dana tersebut telah dituangkan dalam *Title I of the Elementary and Secondary Education Act of 1965*. Pelanggaran ini disebabkan oleh sikap negara-negara bagian dan sekolah-sekolah tersebut tidak berminat / *not interested* dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut di atas.

Untuk mengatasi kebuntuan implementasi karena adanya resistensi dari pelaksana, Edwards III menawarkan dua alternatif solusi. Alternatif pertama adalah dengan pergantian personel, sedangkan alternatif kedua adalah dengan memanipulasi insentif.

3. Teori Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa : “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut E. F. L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handyaningrat koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi :

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
3. *Directing* atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

1. *Sense of Cooperation*, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
2. *Rivalry*, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
3. *Team Spirit*, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
4. *Esprit de Corps*, bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat.

Selanjutnya koordinasi memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Jadi dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas di dalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, pengkoordinasian dimaksudkan agar para manajer mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki organisasi tersebut. Kekuatan suatu

organisasi tergantung pada kemampuannya untuk menyusun berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan.

Menurut Hasibuan (2006 : 86) Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik. Hasibuan berpendapat bahwa tipe koordinasi di bagi menjadi dua bagian besar yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Kedua tipe ini biasanya ada dalam sebuah organisasi. Makna kedua tipe koordinasi ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

- a) Koordinasi vertikal (*Vertical Coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*Horizontal Coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun

ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Sedangkan *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) beserta unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan secara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Hasibuan (2006: 88), berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

a. Kesatuan Tindakan

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

b. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi

merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

Dari pengertian komunikasi sebagaimana disebut di atas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

B. Kerangka Pikiran

Berdasarkan variabel penelitian yaitu “Evaluasi Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penyelesaian Masalah HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.” kemudian di ukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan hubungan diantara unsur-unsur diatas agar tidak terjadi kesalahan dan penafsiran makna.

Untuk lebih jelasnya gambaran antar variabel penelitian dengan teori yang dijadikan indikator dan fenomena yang terjadi akan disimpulkan sebagai berikut:

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Tentang Evaluasi Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penyelesaian Masalah HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2016



C. Konsep Operasional

Dalam penelitian ini penulis menurunkan konsep operasional yang digunakan untuk menjelaskan batasan-batasan permasalahan sebagai berikut:

- Evaluasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program.

- Program adalah rencana suatu pelaksanaan yang akan dilakukan sebagai dasar dalam operasional suatu lembaga atau organisasi.
- Pemerintah adalah instansi atau dinas yang menangani masalah pemerintahan di daerah.
- Kegiatan adalah suatu pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam operasional lembaga atau organisasi.
- Penanggulangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dari dampak negatif dari suatu masalah.
- Penularan adalah hal-hal yang dapat terjangkit suatu wabah baik disengaja maupun tidak disengaja.
- HIV/AIDS adalah sejenis penyakit menular yang menyerang kekebalan tubuh manusia.
- Komisi Penanggulangan AIDS adalah lembaga yang dibentuk pemerintah melalui keputusan presiden dan berbagai keputusan lainnya untuk melakukan kebijakan dalam penanggulangan AIDS mulai di Perkotaan hingga kedaerah-daerah.
- Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang terdapat di Propinsi Riau.
- Program Pencegahan HIV/AIDS merupakan suatu kegiatan untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS.
- Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA yaitu suatu kegiatan untuk memberikan pelayanan berupa pengobatan dan perawatan bagi ODHA agar tetap dapat bertahan hidup normal.
- Program Penunjang yaitu program yang dibentuk untuk memberikan kegiatan bagi ODHA dalam menghadapi kondisinya.

Sehubungan dengan indicator dalam penelitian ini, menggunakan konsep teori menurut Program Kerja dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru tahun 2016 yaitu:¹

1. Program Pencegahan HIV/AIDS
2. Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA
3. Program Penunjang

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penyelesaian Masalah HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. (Dunn, 2003, 28). Evaluasi program KPA Kota Pekanbaru meliputi program pencegahan HIV/AIDS, Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA Dan Program Penunjang.	Evaluasi Program Kerja KPA Kota Pekanbaru	Program Pencegahan HIV/AIDS	1. Kampanye penggunaan kondom 100% kepada kelompok resiko tinggi; 2. Penerapan Universal Precaution pada fasilitas pelayanan kesehatan. 3. Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melalui media komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) HIV/AIDS	- Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai

¹Program Kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, 2016

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
		Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan fasilitas pelayanan pengobatan, perawatan dan laboratorium untuk kasus IMS, HIV/AIDS. 2. Kebijakan tentang Pembiayaan Pengobatan ODHA 3. Kebijakan tentang Pembiayaan Obat ARV, Infeksi Opportunistik dan IMS 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai
		Program Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Jejaring Penanggulangan HIV/AIDS 2. Penyusunan PERDA dan Petunjuk Teknis tentang Penanggulangan HIV/AIDS 3. Program Peningkatan kualitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai - Tercapai - Kurang tercapai - Tidak Tercapai

Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

2. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap variabel penelitian “Evaluasi Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penyelesaian Masalah HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru Tahun 2016”. Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel penelitian dengan menggunakan indikator kualitas dari evaluasi program itu sendiri dikatakan:

Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori program terlaksana dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Kurang tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori program terlaksana sebagian dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Tidak Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori program tidak terlaksana dengan persentase berkisar < 33%

Sedangkan pengukuran terhadap indikator variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan HIV/AIDS

Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tercapai dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Kurang Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang tercapai dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Tidak Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tidak tercapai dengan persentase berkisar $< 33\%$

2. Program Pengobatan dan Perawatan serta Dukungan terhadap ODHA dikatakan:

Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tercapai dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Kurang Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang tercapai dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Tidak Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tidak tercapai dengan persentase berkisar $< 33\%$

3. Program Penunjang dikatakan:

Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tercapai dengan persentase berkisar antara 67% - 100%

Kurang Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori kurang tercapai dengan persentase berkisar antara 34% - 66%

Tidak Tercapai : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi indikator variabel pada kategori tidak tercapai dengan persentase berkisar $< 33\%$